

**PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK : STUDI KASUS
PADA PENGADAAN LANGSUNG TAHUN 2019**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Terapan
dalam Ilmu Administrasi Negara**

Disusun Oleh :

**NAMA : ZULCKY WIDYANTO
NPM : 1731017177
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA**



SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

TAHUN 2021

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ZULCKY WIDYANTO
NPM : 1731017177
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK : STUDI
KASUS PADA PENGADAAN LANGSUNG
TAHUN 2019

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada 22 Agustus 2021

Pembimbing



Dr. Ridwan Rajab M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana
Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada 31 Agustus 2021.

Ketua merangkap anggota,



Hidayaturahmi, S.Sos., MPA.

Sekretaris merangkap anggota,

A black ink signature is written over the text.

Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.P.A.

Anggota,

A blue ink signature is written over the text.

Dr. Ridwan Rajab, M.Si.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulcky Widyanto
NPM : 1731017177
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini dengan judul **Pengadaan Barang dan Jasa pada Direktorat Jenderal Pajak : Studi Kasus pada Pengadaan Langsung Tahun 2019** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 22 Agustus 2021
Penulis,



Zulcky Widyanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas ridho dan hidayah-NYA, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi yang berjudul “PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK : STUDI KASUS PENGADAAN LANGSUNG TAHUN 2019” ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik program studi Sarjana Terapan pada jurusan Administrasi Pembangunan Negara (APN) di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si, selaku Ketua Program Studi S1 APN dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir, serta semua pihak yang telah membantu, mendoakan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Bapak Yunirwansyah, selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat;
3. Ibu Susi Susilowati, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat;

4. Ibu Marlina Ekawati, selaku Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat;
5. Para Pejabat Pengadaan, Staf PPK, dan Bendahara pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat;
6. Keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung penulis; dan
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-NYA dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis sangat menghargai apabila ada saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 22 Agustus 2021

Penulis,

Zulcky Widyanto

ABSTRAK

Zulcky Widyanto, 1731017177

**PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK : STUDI KASUS PADA PENGADAAN
LANGSUNG TAHUN 2019**

Skripsi, lxxi hlm., 75 halaman.

Latar belakang penelitian ini adalah ketika pada tahun 2019 kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindak pidana korupsi sangat bergantung pada individu para pelakunya, sehingga implementasi prinsip-prinsip dan etika pengadaan sangatlah penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data secara langsung di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sebagai lokasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi.

Dari berbagai informasi melalui hasil wawancara dan hasil studi dokumentasi, dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti agar pengadaan barang/jasa kedepannya sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung di Kanwil DJP Jakarta Pusat sudah dilaksanakan dengan mengimplementasikan prinsip dan etika pengadaan namun masih terdapat alur yang salah dan tahapan yang kurang, sehingga pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung di Kanwil DJP Jakarta Pusat pada tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut peneliti memberikan saran antara lain, melakukan sosialisasi/In House Training/pemberitahuan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, pelaksanaan diklat penyegaran pengadaan barang/jasa secara berkala, membuat wadah atau tempat khusus bagi PPK untuk menyimpan dokumen pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa, serta melakukan kegiatan pendekatan emosional yang menekankan pada penguatan integritas dalam melakukan pekerjaan.

Kata kunci : pengadaan barang/jasa, pengadaan langsung

ABSTRACT

Zulcky Widyanto, 1731017177

**PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES AT THE
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES: A CASE STUDY ON
DIRECT PROCUREMENT IN 2019**

Essay, lxxi pages., 75 pages.

The background of this research is when in 2019 the corruption case in the procurement of government goods/services took second place in the case handled by the Corruption Eradication Commission (KPK). The crime of corruption is very dependent on the individual perpetrators, so that the implementation of the principles and ethics of procurement is very important in the implementation of the procurement of goods/services. The purpose of this research is to find out the process of implementing the procurement of goods/services through providers using the direct procurement method at the Directorate General of Taxes in 2019.

The method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. In this study, the authors collected data directly at the Central Jakarta DGT Regional Office as the research location by using interviews and documentation studies.

From various information through interviews and results of documentation studies, it can be stated that in the implementation of the procurement of goods/services with the direct procurement method at the Central Jakarta DGT Regional Office, there are things that need to be followed up so that future procurement of goods/services is in accordance with existing regulations. Thus, it can be said that the procurement of goods/services using the direct procurement method at the Central Jakarta DGT Regional Office has been carried out by implementing procurement principles and ethics but there are still wrong flows and lacking stages, so that the procurement of goods/services using the direct procurement method at the Central Jakarta DGT Regional Office in 2019 has not fully complied with the established regulations.

To correct this discrepancy, the researcher provides suggestions, among others, conducting socialization/In House Training/notifications to all parties involved in the process of procuring goods/services, implementing training and training to refresh the procurement of goods/services on a regular basis, creating a special container or place for PPK to store documents. implementation of goods/services procurement activities, as well as carrying out emotional approach activities that emphasize strengthening integrity in doing work.

Keywords : procurement, direct procurement

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Fokus Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Teori	8
B. Konsep Kunci	37
C. Model Berpikir	37
D. Pertanyaan Penelitian	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	40
B. Teknik Pengumpulan Data	42
C. Prosedur Pengolahan Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian	47
B. Hasil dan Analisis Data	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	xiii
----------------------	------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	xix
-------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	lxxi
----------------------------	------

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Hal
Tabel 1 : Statistik Tindak Pidana Korupsi (TPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2019	4
Tabel 2 : Statistik Tindak Pidana Korupsi (TPK) Berdasarkan Instansi Tahun 2019	4
Tabel 3 : Daftar <i>Key Informant</i>	43
Tabel 4 : Daftar Paket Pengadaan Langsung TA 2019	50
Tabel 5 : Daftar Paket Pengadaan Langsung TA 2019 (SPK)	54
Tabel 6 : Checklist Kelengkapan Dokumen Pengadaan Langsung	59

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Hal
Gambar 1 : Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	26
Gambar 2 : Model Berpikir	38
Gambar 3 : Struktur Organisasi DJP Tahun 2019	47
Gambar 4 : Struktur Organisasi Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2019	49
Gambar 5 : Alur Pengadaan Langsung di Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2019.....	57
Gambar 6 : Alur Pengadaan Langsung Menurut Peraturan LKPP	58

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap lembaga atau instansi pemerintah dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasionalnya tidak dapat lepas dari proses pengadaan barang/jasa, karena berbagai kegiatan yang dilakukan memiliki kebutuhan akan barang/jasa yang berbeda-beda.

Pengadaan barang/jasa memang telah diketahui sebagai pekerjaan yang rentan akan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, namun pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi semua lembaga atau instansi pemerintah untuk menunjang kegiatan operasionalnya, apabila tidak dilaksanakan maka kegiatan operasional lembaga atau instansi tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dibutuhkan ketelitian, pemahaman, dan integritas yang tinggi dalam pengadaan barang/jasa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyimpanan arsip dokumen pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa mengatur tentang persyaratan bagi pegawai yang akan ditetapkan sebagai pelaku pengadaan barang/jasa. Salah satu persyaratannya adalah memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan

jabatan dalam pengadaan barang/jasa. Saat ini sertifikasi dilakukan oleh LKPP melalui Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jabatan sebagai pelaku pengadaan barang/jasa memang bukan jabatan utama bagi seorang pegawai, namun hanya merupakan *ad hoc* yang dibentuk atau ditunjuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan pengadaan barang/jasa. Pemerintah telah menyediakan honorarium bagi pelaku pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM) setiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Keuangan. Meskipun demikian, masih banyak orang atau pegawai yang tidak bersedia menjalankan pengadaan barang/jasa karena honorarium yang diberikan dianggap tidak sebanding dengan resiko pekerjaan yang tinggi karena memiliki konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga ada sebagian orang atau pegawai sengaja tidak meluluskan ujian sertifikasinya agar tidak ditunjuk sebagai pelaku pengadaan barang/jasa.

Setiap tahunnya pengadaan barang/jasa menjadi objek pemeriksaan atau audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana BPK akan mengambil beberapa *sample* pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan untuk diperiksa kelengkapan dokumennya serta tahapan pelaksanaannya apakah sudah dilakukan seluruhnya dan sesuai aturan.

Hal ini tentunya harus mendapat perhatian dari lembaga atau instansi pemerintah khususnya pelaku pengadaan barang/jasa, dimana seringkali pegawai yang ditunjuk sebagai pelaku pengadaan barang/jasa mengalami mutasi. Apabila tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak diperhatikan dan arsip dokumen pengadaan barang/jasa tidak disimpan dengan baik, maka berpotensi menimbulkan masalah pada saat dilakukan pemeriksaan atau audit, karena kesulitan untuk mencari keberadaan dokumen yang disimpan oleh pegawai yang mengalami mutasi. Demikian juga dengan tahapan yang harus dilaksanakan, apabila ada tahapan yang tidak dilaksanakan secara baik dan benar maka akan berpotensi menimbulkan masalah apalagi sampai terlewatkan, karena masing-masing tahapan akan menghasilkan dokumen yang memiliki kekuatan hukum.

Pada tahun 2019, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan bahwa kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Kompas.com, 6 November 2019).

Dalam rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), KPK membagi ke dalam beberapa kategori. Kategori tersebut diantaranya adalah TPK berdasarkan Jenis Perkara dan TPK berdasarkan Instansi. Rekapitulasi ini bertujuan sebagai laporan singkat kinerja KPK di ranah penindakan.

Tabel 1
Statistik Tindak Pidana Korupsi (TPK) Berdasarkan Jenis Perkara
Tahun 2019

Perkara	Jumlah Kasus	Persentase
Pengadaan Barang/Jasa	18	12,41%
Perijinan	0	0,00%
Penyuapan	119	82,07%
Pungutan/Pemerasan	1	0,69%
Penyalahgunaan Anggaran	2	1,38%
TPPU	5	3,45%
Merintangi Proses KPK	0	0,00%
Jumlah	145	100%

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi 2020

Tabel 2
Statistik Tindak Pidana Korupsi (TPK) Berdasarkan Instansi
Tahun 2019

Perkara	Jumlah Kasus	Persentase
DPR dan DPRD	7	4,83%
Kementerian/Lembaga	44	30,34%
BUMN/BUMD	17	11,72%
Komisi	0	0,00%
Pemerintah Provinsi	11	7,59%
Pemkab/Pemkot	66	45,52%
Jumlah	145	100%

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi 2020

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu lembaga negara di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Sebagai lembaga negara yang menjalankan kegiatan operasional dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DJP menjalankan kegiatan pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena pada tahun 2019 penulis mengalami mutasi dari Kantor Pusat DJP ke Kanwil DJP Jakarta Pusat dan ditempatkan di Bagian Umum sebagai pelaksana pada Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Pekerjaan yang diberikan sangat berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dimana penulis berperan sebagai pengusul dalam hal kebutuhan pengadaan barang/jasa pada Kanwil DJP Jakarta Pusat, sehingga penulis ingin melihat dan mendalami proses pengadaan barang/jasa serta implementasi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa di Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Tindak pidana korupsi sangat bergantung pada individu para pelakunya, sehingga implementasi prinsip-prinsip dan etika pengadaan sangatlah penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Penulis memilih untuk meneliti pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung, karena dapat dikatakan

bahwa seluruh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki anggaran operasional pasti melakukan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung. Hal ini dikarenakan batasan penggunaan metode pengadaan langsung mencakup pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh instansi-instansi tertentu saja yang memiliki anggaran serta kebutuhan akan barang/jasa yang lebih luas dan dalam jumlah yang besar.

Kemudian sebagai mahasiswa ilmu administrasi, tentu penting bagi penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di suatu lembaga atau instansi pemerintah baik dari sisi administrasi maupun teknis. Sehingga ketika penulis terjun ke dunia pengadaan barang/jasa, penulis sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Terhadap Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber atau referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

Selain itu, dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

b. Manfaat Terhadap Dunia Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih baik dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.